

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad (2), Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada, Jakarta, 2009.

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan Keempat, Bayu Media Publishing, Malang, 2011.

Amiruddin dan Zainan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Andi Hamzah (2), Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta.

Andi Hamzah (3), Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya, Sofmedia, 2012.

Anwar Sanusi, Metode Penelitian Bisnis, 2011.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, SinarGrafika, Jakarta, 2002.

Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan 1, Permata Aksara, Jakarta, 2013.

- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.
- Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999.
- Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT
Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Dwidja Priyatno, dan Kristian, Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi.
- E. Utrecht, Pengertian Dalam Hukum Indonesia, Balai Buki Ichtar, Jakarta, 1959.
- Erman Rajagukguk, Butir-Butir Hukum Ekonomi, Lembaga Studi Hukum dan
Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Erman Radjagukguk (2), Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara,
Makalah, Jakarta, 2017.
- Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan
Komisaris Perseroan Terbatas, Visimedia, 2009
- Friedrich, Carl Joachim, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan
Nusamedia, Bandung, 2004.
- Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan 5, Djambatan, Jakarta,
2009.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali
Pers, Jakarta, 2015.
- Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judgement Rule, Tatanusa, Jakarta,
2008.

- Hotasi Nababan, Hukum Tanpa Takaran, Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan, Q Communication, 2015.
- I Dewa Made Suartha, Hukum Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Setara Press Malang, 2015.
- Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cetakan I, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Kristian, Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Refika Aditama, 2016.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, 2011.
- Misahardi Wilamarta, Doktrin-Doktrin Fiduciary Duties & Business Judgement Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas, Depok: CELS, 2007.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2000.
- Moleong, J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2013.
- Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV Utomo, Bandung, 2005.
- O.C Kaligis, Kejahatan Jabatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu, PT. Alumni Bandung, 2011.

Orinton Purba, Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dan Jerat Hukum, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki (2), Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki (3), Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, 2005.

Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Philippus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Prasetio, Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN, Cetakan 1, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2014.

Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Cetakan 2, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999

Rudhi Prasetya, Teori dan Praktik Perseroan Terbatas, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.

Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, 2015.

Soerjono Soekanto (2), Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sutan Remi Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Erlangga, Jakarta, 2012.

Jurnal-jurnal :

Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, Visimedia, 2009.

Fred B.G Tumbuan, Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (Makalah), Jakarta, Agustus 2007

Martha, Ramli Siregar, Windha, 2013, Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian atau Kesalahannya yang Mengakibatkan Perseroan Pailit, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei, Vol I Nomor 1.

Mcmillan, Lori, "The Business Judgement Rule as An Immunity Doctrine", William And Marry Business Law Review, Vol. 4, No. 2, August 2013.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

- Muh. Hasrul, 2013, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Muhammad Gary, Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis, Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol. 1 No. 1 2016.
- Muhammad Teguh, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia..., Business Law Review Volume Two.
- Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat, 2015.
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol 7 No. 3, Desember 2014
- Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sang Made Satya Dita Permana. dkk, 2016, Kedudukan Hukum Direksi Terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 04, No. 03 April 2019.
- Sartika Nanda Lestari, 2015, “Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, Jurnal Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Siti Hapsah Isardiyana, 2017, Business Judgement Rule oleh Direksi Perseroan,
Jurnal Panorama Hukum, Vol 2. No.1, Juni 2017, Malang.

Shinta Ikayani Kusumawardani, 2013, “Pengaturan Kewenangan dan Tanggung
Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan
Indonesia dan Australia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2 No.
1 2013.

Shinta Agustina, dkk., Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum Penafsiran
Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Judicial Sector Support Program, 2016.

Stephanie, Interpretasi Kerugian Negara Dalam Perbuatan Hukum Yang
Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara, Jurnal
Rechtsvinding Online.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst;

Putusan Mahkamah Agung No. 130 PK/Pid.Sus/2013 tanggal 29 April 2014

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi No. 417 K/Pid.Sus/2014;

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali No. 41
PK/Pid.Sus/2015.

Website :

<https://www.hukumonline.com>, Hotasi Nababan Pertanyakan Putusan Kasasi MA,
diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

<https://kbbi.web.id/korporasi> pada tanggal 4 Desember 2019

<https://mediaindonesia.com/read/detail/295800-karen-agustiawan-bukan-bebas-melainkan-lepas> pada tanggal 15 Agustus 2020

<https://www.tribunnews.com>, Erman Rajagukguk: Penyewaan Pesawat Merpati
Ranah Perdata, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

Nindyo Pramono, Beauty Contest Business Judgment Rule versus Persaingan
Usaha Tidak Sehat, diakses pada <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 23
April 2020

